

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
 DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu Capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang Berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yangterdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusiadan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencanadan/atau berpotensi bencana provinsi yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan Tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan.
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk padakondisi kejadianluar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata carapemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah penduduk yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum peradilan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum peradilan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis PelayananDasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosialdasar penyandangdisabilitas terlantar di dalampanti	Jumlah WargaNegara penyandang disabilitas terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuaidengan jumlahWarga Negara penyandang disabilitas terlantar yangakan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidangsosial
2	Rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negaraanak terlantar yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasaranak terlantar di dalam panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negaraanak terlantaryang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosialdasar lanjut usia terlantar di dalampanti	Jumlah WargaNegara lanjut usia terlantaryang mendapatkan rehabilitasi sosial dasarlanjut usia di dalam panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yangakan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosialdasar tuna sosialkhususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	Jumlah WargaNegara gelandangan danpengemis yangmendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuaidengan jumlahWarga Negara gelandangan danpengemis yangakan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosialpada saat dan setelah tanggap darurat bencanabagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korbanbencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang,jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negarakorban bencanaprovinci yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

B. FORMAT TAHAPAN PENERAPAN SPM

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

A. Pengumpulan Data Pendidikan

FORM 1.A.1	Rekapitulasi kebutuhan data untuk angka partisipasi provinsi
FORM 1.A.3	Rekapitulasi kebutuhan data untuk jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan provinsi
FORM 1.A.5	Rekapitulasi kebutuhan data kualitas hasil Belajar provinsi
FORM 1.A.6	Rekapitulasi kebutuhan data kualitas hasil Belajar kejuruan provinsi
FORM 1.A.8	Rekapitulasi kebutuhan data pemerataan kualitas hasil belajar: literasi dan numerasi Provinsi
FORM 1.A.10	Rekapitulasi kebutuhan data kualitas lingkungan belajar provinsi

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

FORM 1.B.1	Penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan provinsi
------------	---

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

FORM 1.C.1	Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan provinsi
------------	--

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan

FORM 1.D.1	Realisasi pencapaian pemenuhan SPM pendidikan provinsi
FORM 1.D.3	Rekapitulasi pencapaian pemenuhan SPM pendidikan per kabupaten/kota

E. Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan)

FORM 1.E.1	Capaian target SPM pendidikan
FORM 1.E.2	Perhitungan indeks pencapaian SPM pendidikan (provinsi)

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

A. Pengumpulan Data Kesehatan

FORM 2.A.1	Data daerah dan rekapitulasi jumlah penduduk untuk pelayanan dasar kesehatan daerah provinsi
FORM 2.A.2	Rekapitulasi penduduk untuk pelayanan dasar kesehatan daerah kabupaten/kota
FORM 2.A.3	Rekapitulasi fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan daerah kabupaten/kota

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan DasarKesehatan

FORM 2.B.1	Penghitungan kebutuhan pembiayaan kegiatan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah provinsi
FORM 2.B.2	Penghitungan kebutuhan barang/alat untuk pelayanan dasar kesehatan daerah provinsi
FORM 2.B.3	Penghitungan kebutuhan SDM kesehatan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah provinsi

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan

FORM 2.C.1	Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah provinsi
FORM 2.C.2	Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen Rencana strategis perangkat daerah provinsi

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan

FORM 2.D.1	Capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah provinsi
------------	---

E. Capaian Target Spm Kesehatan (Rekapan)

FORM 2.E.1	Rekapitulasi capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan daerah provinsi
FORM 2.E.2	Rekapitulasi capaian standar pelayanan inimal bidang kesehatan daerah kabupaten/kota

III. BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. Pengumpulan Data Pekerjaan Umum

FORM 3.A.1	Kondisi SPAM regional provinsi
FORM 3.A.2	Kondisi SPALD regional provinsi

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan DasarPekerjaan Umum

FORM 3.B.1	Rumah terlayani SPAM regional provinsi
FORM 3.B.2	Rumah terlayani SPALD regional provinsi

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan DasarPekerjaan umum

FORM 3.C.1	Rencana pemenuhan air minum provinsi
FORM 3.C.2	Rencana pemenuhan air limbah domestik provinsi

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pekerjaan umum

FORM 3.D.1	Capaian layanan air minum provinsi
FORM 3.D.2	Capaian layanan air limbah domestik provinsi

E. Capaian Target SPM Pekerjaan Umum (Rekapan)

FORM 3.E.1	Rekapitulasi layanan air minum provinsi
FORM 3.E.2	Rekapitulasi layanan air limbah domestik provinsi
FORM 3.E.3	Rekapitulasi layanan air minum kabupaten/kota
FORM 3.E.4	Rekapitulasi layanan air limbah domestik Kabupaten/kota

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. Pengumpulan Data Perumahan Rakyat

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

FORM 4.A.1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana provinsi
FORM 4.A.2	Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan provinsi
FORM 4.A.3	Pengumpulan data rumah yang terkena bencana provinsi

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.A.7	Identifikasi perumahan di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
FORM 4.A.8	Identifikasi perumahan di kawasan kumuh provinsi (10-15 ha)
FORM 4.A.9	Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah provinsi
FORM 4.A.10	Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya di kabupaten/kota
FORM 4.A.11	Identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota
FORM 4.A.12	Identifikasi perumahan di kawasan kumuh Kabupaten/kota (<10 ha)
FORM 4.A.13	Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

- 1) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

FORM 4.B.1	Penghitungan kebutuhan rumah layak Huni bagi masyarakat yang terkena bencana provinsi
FORM 4.B.2	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana Provinsi

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.B.5	Penghitungan kebutuhan rumah layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi
FORM 4.B.6	Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

FORM 4.C.1	Rencana pemenuhan rumah layak huni Bagi masyarakat yang terkena bencana provinsi
------------	--

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.C.3	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program provinsi
FORM 4.C.4	Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

FORM 4.D.1	Rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena bencana provinsi tahun-N
FORM 4.D.2	Rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota tahun-N

- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

FORM 4.D.3	Rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena relokasi Program pemerintah provinsi tahun-N
FORM 4.D.4	Rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota tahun-N

E. Capaian Target SPM Perumahan Rakyat (Rekapan)

FORM 4.E.1	Capaian target SPM perumahan rakyat provinsi
FORM 4.E.2	Capaian target SPM perumahan rakyat kabupaten/kota

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

1) Trantibumlinmas Sub-Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)

A. Pengumpulan Data Trantibum

FORM 5.A.1	Perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dilokasi penegakan perda dan perkada
FORM 5.A.2	Perkiraan rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara yang berada dalam radius0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada
FORM 5.A.3	Rekapitulasi SOP kegiatan penegakan perda/perkada
FORM 5.A.4	Rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD Satpol PP
FORM 5.A.5	Rekapitulasi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh OPD Satpol PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)
FORM 5.A.6	Rekapitulasi perda perkada yang akan ditegakkan
FORM 5.A.7	Rekapitulasi warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada alam radius 0-50 meter
FORM 5.A.8	Rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum

FORM 5.B.1	Penghitungan kebutuhan penerima layanan SPM trantibumlinmas sub-urusan trantibum
FORM 5.B.2	Penghitungan kebutuhan penyusunan SOP
FORM 5.B.3	Penghitungan kebutuhan peningkatankapasitas personil SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS
FORM 5.B.4	Penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP
FORM 5.B.5	Penghitungan perkiraan kebutuhan pelayanan dasar warga negara yangterkena dampak

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum

FORM 5.C.1	Rencana pemenuhan pelayanan dasar SPM trantibumlinmas sub-urusan trantibum dan kerangka pendanaan provinsi
FORM 5.C.3	Rencana pemenuhan personilSatpol PP provinsi
FORM 5.C.5	Rencana pemenuhan sarana dan prasarana provinsi

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum

FORM 5.D.1	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar SPM trantibumlinmas sub-urusan trantibum warga negara, Fasum, Fasos dan Aset warga negara provinsi
FORM 5.D.3	Realisasi pencapaian pemenuhan personil Satpol PP provinsi
FORM 5.D.5	Realisasi pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana provinsi

E. Capaian Target SPM Trantibum (Rekapan)

FORM 5.E.1	Capaian target capaianSPM sub-urusan ketenteraman dan ketertiban umum
------------	---

2) Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana

A. Pengumpulan Data Bencana

FORM 5.2.A.1	Daftar warga negara yang berada di kawasan rawan bencana
FORM 5.2.A.2	Daftar kerawanan tempat tinggal individu warga negara
FORM 5.2.A.3	Rekapitulasi kelompok warga negara berdasarkan kelompok kerawanan desa
FORM 5.2.A.4	Rekapitulasi aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana
FORM 5.2.A.5	Daftar petugas operasi penanganan arurat bencana berdasarkan lokasi penugasan
FORM 5.2.A.6	Rekapitulasi warga negara wajib latih
FORM 5.2.A.7	Daftar ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana
FORM 5.2.A.8	Daftar ketersediaan stok logistik pengungsian
FORM 5.2.A.9	Daftar warga negara yang menjadi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)
FORM 5.2.A.10	Daftar status korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)
FORM 5.2.A.11	Daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana (diisi dan diperbaruietiap kejadian bencana)
FORM 5.2.A.12	Daftar kejadian bencana (diisi dandiperbarui setiap kejadian bencana)

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan DasarBencana

FORM 5.2.B.1	Penghitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
FORM 5.2.B.2	Penghitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana

FORM 5.2.C.1	Rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
FORM 5.2.C.2	Rencana proyeksi kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Bencana

FORM 5.2.D.1	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
FORM 5.2.D.2	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

E. Capaian Target SPM Bencana (Rekapan)

FORM 5.2.E.1	Penentuan bobot tertimbang (BT) pada SPM sub-urusan bencana
FORM 5.2.E.2	Rekapitulasi kinerja tahunan SPM sub-urusan bencana
FORM 5.2.E.3	Rekapitulasi capaian tahunan SPM sub-urusan bencana

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

A. Pengumpulan Data Sosial

FORM 6.A.1	Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis
FORM 6.A.2	Rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di dalam panti dan/atau lembaga baik milik Pemerintah maupun masyarakat
FORM 6.A.3	Rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan di luar panti dan/atau lembaga (berbasis keluarga/masyarakat/ komunitas)
FORM 6.A.4	Rekapitulasi estimasi jumlah koban bencana alam dan sosial provinsi
FORM 6.A.5	Rekapitulasi estimasi jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota
FORM 6.A.6	Data dan rekapitulasi jumlah sumberdaya manusia kesejahteraan sosial (SDM kesos)
FORM 6.A.7	Data dan rekapitulasi sarana dan prasarana untuk pemenuhan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial daerah provinsi

B. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

FORM 6.B.1	Penghitungan penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
FORM 6.B.2	Penghitungan anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
FORM 6.B.3	Penghitungan lanjut usia terlantar yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
FORM 6.B.4	Penghitungan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti
FORM 6.B.5	Penghitungan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya di wilayah provinsi

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

FORM 6.C.1	Rencana pemenuhan penyandang disabilitas terlantar dalam panti
FORM 6.C.2	Rencana pemenuhan penyandang anak terlantar dalam panti
FORM 6.C.3	Rencana pemenuhan lansia terlantar dalam panti
FORM 6.C.4	Rencana pemenuhan gelandangan dan pengemis lansia dalam panti
FORM 6.C.5	Rencana pemenuhan korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi

D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial

FORM 6.D.1	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan Dasar bagi penyandang disabilitas dalam panti
FORM 6.D.2	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi anak terlantar dalam panti
FORM 6.D.3	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi lansia terlantar dalam panti
FORM 6.D.4	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi pengemis dan gelandangan Lansia dalam panti
FORM 6.D.5	Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng diluar panti

E. Capaian Target SPM Sosial (Rekapan)

FORM 6.E.1	Capaian target SPM sosial
------------	---------------------------

FORM 1.A.1 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 16 SAMPAI DENGAN 18 TAHUN		WARGA NEGARA USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN (MELALUI SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN INKLUSIF)	
		JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG MENENGAH	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN YANG SEDANG BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH ANAK USIA 16 (ENAM BELAS) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 4-18 TAHUN PENYANDANG DISABILITAS YANG BERSEKOLAH	PENYANDANG DISABILITAS PADA PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)						
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah Peserta Didik bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah Penduduk Usia Sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang menengah
- Kolom 4 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan
- Kolom 5 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan
- Kolom 6 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan
- Kolom 7 : Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 tahun (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang bersekolah
- Kolom 8 : Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.3 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS (SMA/SMK/PAKET C/DIKSUS)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C)						
2	Pendidikan Khusus						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
- Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan
- Kolom 5 : Indeks distribusi guru tahun N
- Kolom 6 : indeks distribusi guru tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
- Kolom 8 : Jumlah lulusan program guru penggerak di provinsi yang bersangkutan

FORM 1.A.5 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional didik bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.6 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR KEJURUAN

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TINGKAT PENYERAPAN LULUSAN SMK		KEPUASAN DUNIA KERJA TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	
		TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK YANG BEKERJA ATAU BERWIRAUSAHA ATAU MELANJUTKAN STUDI	TOTAL JUMLAH INDIVIDU LULUSAN SMK PADA TAHUN TERTENTU BERDASARKAN RAPOR PENDIDIKAN	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK	TINGKAT KEPUASAN DUNIA KERJA PADA TAHUN N-1 TERHADAP BUDAYA KERJA LULUSAN SMK
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMK)				

- Jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha bersumber dari data Kemdikbudristek
- Tingkat kepuasan dunia kerja bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Total jumlah individu lulusan SMK yang bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi
- Kolom 4 : Total jumlah individu lulusan SMK pada tahun tertentu berdasarkan rapor pendidikan
- Kolom 5 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N terhadap budaya kerja lulusan SMK
- Kolom 6 : Tingkat kepuasan dunia kerja pada tahun N-1 terhadap budaya kerja lulusan SMK

FORM 1.A.8 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR: LITERASI DAN NUMERASI

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)								
2	Pendidikan Khusus								

- Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari data Kemdikbudristek
- Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Rata-rata skor literasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 7 : Rata-rata skor numerasi peserta didik laki-laki berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 8 : Rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 9 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 10 : Rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.10 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

PROVINSI:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS).		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK/DIKSUS)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)				
2	Pendidikan Khusus				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 bersumber dari data Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N dan N-1 dari data Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 4 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N berdasarkan Asesmen Nasional
- Kolom 6 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN PENDIDIKAN

PROVINSI :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	11	12
	Program SPM Pendidikan Menengah	% penduduk usia 16-18 Tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik					
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik					
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas					
				2	Fasilitasi pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan					
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan				
				1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru				
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan				
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan				
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan				
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas				
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan				

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10=8-9	11	12
			(SMA/SMK/Paket C)	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan					
			Tingkat penyerapan lulusan (SMK)	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	1	Tersedianya Data	Lulusan					
				2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	2	Tersedianya Data	Lembaga sertifikasi					
			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	1	Kemitraan terfasilitasi	Kegiatan					
2	Program SPM Pendidikan Khusus	% penduduk usia 4-18 Tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik					
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik					
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas					
				2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1 Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan					
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2 Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3 Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan					
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4 Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan					
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Ajuan formasi guru	Guru					
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan Pendidikan	4 Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan					
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5 Penempatan kepala sekolah	Kegiatan					
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6 Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan					
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7 Tersedianya data	Pengawas					

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUT UHAN	KETER SEDIA AN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN	KEBUTU HAN BIAYA
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10=8-9	11	12
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan				
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan				
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah ketersediaan per masing-masing bentuk pemenuhan SPM
Kolom 10 : Diisi dengan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan (kolom 8 dikurang dengan kolom 9)
Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan per masing-masing bentuk pemenuhan
Kolom 12 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan yang diperoleh dari perkalian kolom 10 dan kolom 11

FORM 1.C.1 RENCANA PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN

PROVINSI :

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024			
										2020			2021			2022			2023			2024						
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Program SPM Pendidikan Menengah	% penduduk usia 16-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/ Paket C/MA/MAK)	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik																				
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik																				
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik																				
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik																				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/ Paket C/MA/MAK)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas																				
				2	Fasilitasi pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/ seminar/ lokakarya	Kegiatan																				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/ Paket C/MA/MAK)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan																				
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan																				
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan																				
				4	sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																				

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)		SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI AKHIR 2024			
												2020			2021			2022			2023			2024				
												TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET		HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/ Paket C)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan																				
				2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata	Pendidik dan tenaga kependidikan																				
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajukan formasi guru	Guru																				
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan																				
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan																				
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan																				
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas																				
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/ Paket C)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan																				
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan																				
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan																				
			Tingkat penyerapan	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	1	Tersedianya Data	Lulusan																				

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN													KONDISI AKHIR 2024			
												2020			2021			2022			2023			2024				
												TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET		HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			lulusan (SMK)	2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	2	Tersedianya Data	Lembaga sertifikasi																				
			Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja..	1	Kemitraan terfasilitasi	Kegiatan																				
2	Program SPM Pendidikan Khusus	% penduduk uk usia 4-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	1	Tersedianya Data	Peserta didik																				
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik																				
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik																				
				4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4	Peserta didik terlayani	Peserta didik																				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus	1	membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1	Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas																				
				2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2	Terselenggaranya pelatihan/seminar /lokakarya	Kegiatan																				
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1	Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan																				
				2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan																				
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3	Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan																				

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024	
										2020			2021			2022			2023			2024				
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																		
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan																		
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan																		
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru																		
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	4	Penempatan	Kegiatan																		
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan	Kegiatan																		
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan	Kegiatan																		
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas																		
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kompetensi	Kegiatan																		
				2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan																		
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru	3	Kepala sekolah atau guru	Kegiatan																		

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI AKHIR 2024	
										2020			2021			2022			2023			2024				
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak																					

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama program rencana pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 3 : Diisi dengan *outcome* program pemenuhan SPM
- Kolom 4 : Diisi dengan nama kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 5 : Diisi dengan sub kegiatan pemenuhan SPM mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- Kolom 6 : Diisi dengan keluaran (output) dari kegiatan pemenuhan
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun 2019
- Kolom 9 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 13 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 9 dan 10
- Kolom 14 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 16 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 12 dan 13
- Kolom 17 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 19 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 15 dan 16
- Kolom 20 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 22 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 18 dan 19
- Kolom 23 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 25 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 21 dan 22
- Kolom 26 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 1.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

PROVINSI :

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah data warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik									
2	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SMA/SMK/Paket C)	Peserta didik									
3	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	Peserta didik									
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)	Peserta didik									
5	Jumlah komunitas belajar (SMA/SMK/Paket C)	Unit komunitas									
6	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
7	Jumlah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
8	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
9	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
10	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
11	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
12	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
13	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SMA/SMK/Paket C)	Guru									
14	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
15	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
17	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (SMA/SMK/Paket C)	Pengawas atau penilik									
18	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
19	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
20	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SMA/SMK/Paket C)	Kegiatan									
21	Jumlah lulusan yang terserap ke dunia kerja (SMK)	Lulusan									
22	Jumlah kemitraan antara satuan pendidikan dengan dunia kerja yang difasilitasi (SMK)	Kegiatan									
23	Jumlah data lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik (SMK)	Lembaga sertifikasi									
24	Jumlah data warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta didik									
25	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (disabilitas)	Peserta didik									
26	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (disabilitas)	Peserta didik									
27	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (disabilitas)	Peserta didik									
28	Jumlah komunitas belajar (disabilitas)	Unit komunitas									
29	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (disabilitas)	Kegiatan									
30	Jumlah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (disabilitas)	Kegiatan									
31	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (disabilitas)	Kegiatan									
32	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (disabilitas)	Kegiatan									
33	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (disabilitas)	Kegiatan									
34	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan									

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	FISIK	KEUANGAN			
35	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
36	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (disabilitas)	Guru									
37	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (disabilitas)	Kegiatan									
38	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (disabilitas)	Kegiatan									
39	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (disabilitas)	Kegiatan									
40	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (disabilitas)	Pengawas									
41	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (disabilitas)	Kegiatan									
42	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (disabilitas)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
43	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (disabilitas)	Kegiatan									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Keluaran (output)
- Kolom 3 : Satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.D.3 REKAPITULASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN PER KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN (%)					
		PAUD	PENDIDIKAN DASAR		PENDIDIKAN MENENGAH	SLB	KESETARAAN
			SD	SMP			
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan anak usia dini
- Kolom 4 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah dasar (SD)
- Kolom 5 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan dasar jenjang sekolah menengah pertama (SMP)
- Kolom 6 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan menengah
- Kolom 7 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan khusus
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian pendidikan kesetaraan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/ T AMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukcapil
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM
- Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satuan pendidikan, PTK dan biaya personil peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
- Kolom 8 : Capaian (%) adalah realiasi dibagi dengan target dikalikan 100%
- Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
- Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 1.E.2 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (PROVINSI)

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN			PENERIMA MANFAAT		PARTISIPASI PESERTA DIDIK		HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PENDIDIK	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	UMUR 16 - 18	UMUR 4 - 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menengah / Kejuruan								
2	Pendidikan Khusus								

FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA			KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)			KETERANGAN
				JENIS BENCANA	SASARAN PENDUDUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN		JENIS KLB	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK (SAKIT)	JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK DAN BERISIKO PADA KONDISI KLB	
					PRA-KRISIS	TANGGAP DARURAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penduduk berpotensi terdampak krisis kesehatan pada saat pra krisis kesehatan
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan
- Kolom 8 : Diisi dengan jenis KLB
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak (SAKIT)
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berisiko/*population at risk* (belum sakit)
- Kolom 11 : Diisi dengan tambahan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA :

NO	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBER KULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA :

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6

- KETERANGAN:**
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 - Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan
 - Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
 - Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
.	A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan							
	B. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan							
II.	Penanggulangan KLB							

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan KLB berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 3 : Diisi dengan komponen kegiatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kuantitatif dari masing-masing komponen kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan satuan dari komponen kegiatan
- Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) dari komponen kegiatan (unit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat atau aturan yang berlaku dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu)
- Kolom 7 : Diisi dengan volume/frekuensi kegiatan yang akan dilakukan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	BARANG/ALAT	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana							
II.	Penanggulangan KLB							

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/alat berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan barang/alat
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/alat yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang dengan kolom 4
- Kolom 6 : Diisi dengan satuan barang/alat
- Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) barang/alat
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikali kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO	SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH SDM TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	Penanggulangan Krisis Kesehatan Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				
II.	Penanggulangan KLB				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SDM kesehatan yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang kolom 4
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	KODE)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM*)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									TAHUN-N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program
- Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
- Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)
- Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi
- Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Provinsi
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program
- Kolom 13 : Diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

**FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN
DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI**

PROVINSI :

NO.	KODE *)					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5					
									K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13
1	1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
	1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat																
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi																
	1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																
	1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan

Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan

Kolom 4 : diisi dengan indikator kinerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)

Kolom 5 : diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan

Kolom 6-10 : diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Provinsi

Kolom 11 : diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Provinsi

Kolom 12 : diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan

Kolom 13 : diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB

*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi									
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100%
- Kolom 9 : Diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB
- Kolom 11 : Diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB

FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)
- Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100
- Kolom 9 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)
- Kolom 10 : Diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan provinsi

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

Kolom 1

: diisi dengan nomor urut

Kolom 2

: diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3

: diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis

Kolom 4

: diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar

Kolom 5

: Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6

: diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)

Kolom 7

: diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar

Kolom 8

: Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100

Kolom 9

: diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan)

Kolom 10

: diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	LOKASI SPAM REGIONAL	UNIT AIR BAKU			UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN (PDAM/UPTD/BADAN USAHA/KP SPAM)
			NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS <i>INTAKE</i> (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	<i>IDLE CAPACITY</i> (liter/detik)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/lintas Kabupaten/Kota (SPAM kewenangan Provinsi), apabila tidak ada dapat dikosongkan
 - Kolom 3 : Diisi lokasi SPAM Regional terbangun
 - Kolom 4 : Diisi nama sumber yang digunakan SPAM Regional
 - Kolom 5 : Diisi lokasi unit air baku
 - Kolom 6 : Diisi kapasitas *intake* unit air baku dalam satuan liter/detik
 - Kolom 7 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik
 - Kolom 8 : Diisi *idle capacity* unit produksi dalam satuan liter/detik
 - Kolom 9 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Pengelola SPAM)

FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	LOKASI SPALD REGIONAL	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			
				KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
							(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD Regional terbangun (IPALD/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi
- Kolom 5 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 6 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 7 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Regional
- Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD regional
- Kolom 9 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Regional
- Kolom 10 : Diisi besaran kapasitas SPALD regional yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 11 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD Regional

FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT				MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Total												

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional Provinsi terbangun
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga)
- Kolom 10 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPAM Regional Provinsi
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPAM Regional Provinsi

FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN					NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN/PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RW	RT						MBR	NON MBR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total															

- KETERANGAN:**
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun
 - Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
 - Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 - Kolom 6 : Diisi nomor RW
 - Kolom 7 : Diisi nomor RT
 - Kolom 8 : Diisi Nomor Induk Keluarga (NIK) kepala keluarga jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) NIK kepala keluarga
 - Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut
 - Kolom 10 : Diisi dengan kepadatan penduduk tiap wilayah (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha)
 - Kolom 11 : Diisi dengan klasifikasi “perkotaan” atau “perdesaan” untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
 - Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (RISPALD) (1 = resiko sanitasi rendah, 2 = resiko rendah, 3 = resiko tinggi, 4 = resiko sangat tinggi
 - Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari UMP
 - Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari UMP
 - Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani oleh SPALD Regional
 - Kolom 16 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani oleh SPALD Regional

FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPAM Regional		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	Dst	Dst					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019
- Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4
- Kolom 6 : Satuan
- Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD Regional terhadap seluruh rumah tangga dalam cakupan wilayah pelayanan SPALD Regional		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	Dst	Dst					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.D.1 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI :

NO.	NAMA SPAM REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
Total *)							

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPAM Regional/Lintas Kabupaten/Kota terbangun (SPAM kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPAM regional
- Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPAM regional dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
- *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.D.2 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI :

NO.	NAMA SPALD REGIONAL	WILAYAH PELAYANAN			TARGET	REALISASI	
		KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TOTAL	SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7	8
Total *)							

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama SPALD Regional terbangun (SPALD kewenangan Provinsi), tidak perlu diisi jika tidak/belum memiliki SPALD regional
Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang akan dilayani oleh SPALD regional dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan dalam satu Kelurahan/Desa
*) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.1 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPAM regional
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM regional sesuai target yang ditentukan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPAM Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.2 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPAM REGIONAL	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota				

KETERANGAN
Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan SPALD regional
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPALD regional sesuai target yang ditentukan
Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPALD Regional (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani BJP)
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota
Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Perdesaan + Terlayani Akses Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman SPALD-T)
Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah
Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

**FORM 4.A.1 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)	KABUPATEN/K OTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
										RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total *)													

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi "rendah/sedang/tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 7 s.d. 14

FORM 4.A.2 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

PROVINSI :

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 6 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan
- Kolom 7 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.3 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA PROVINSI
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 5 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

FORM 4.A.7 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total *)											

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama kawasan pengembangan
Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 6 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi pengembangan kawasan strategis provinsi
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 6 s.d. 12

FORM 4.A.8 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI (10 - 15 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	LOKASI			LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama kabupaten/kota
Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 5 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh 10-15 Ha dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh 10-15 Ha
Kolom 8 : Diisi "ringan/sedang/berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
Kolom 9 : Diisi keterangan

**FORM 4.A.9 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
							MBR	Non MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)													
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha													
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses													
		Total *)												

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 7 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 12 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 13 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 15

**FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sempadan Rel KA									
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
4	Kolong Jembatan									
5	Permukiman Kumuh/Ilegal									
6	Daerah Rawan Bencana									
Total *)										

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN
 PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA:

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
Total *)									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 4 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (< 10 HA)
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA:

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh <10 Ha dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh <10 Ha
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh <10 Ha
- Kolom 7 : Diisi "ringan/sedang/berat" sesuai tingkat kekumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
- Kolom 8 : Diisi keterangan

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA:

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																

KETERANGAN

- Kolom 1

:

Diisi nomor urut
- Kolom 2

:

Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:

1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA

2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai

3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan

5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal

6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana

7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3

:

Diisi nama kecamatan
- Kolom 4

:

Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5

:

Diisi nomor RW
- Kolom 6

:

Diisi nomor RT
- Kolom 7

:

Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 8

:

Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 9

:

Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 10

:

Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11

:

Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12

:

Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 13

:

Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 14

:

Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 15

:

Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 16

:

Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 17

:

Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *)

:

Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN				BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM
												MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Total *)																									

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
- Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi nomor RW
- Kolom 8 : Diisi nomor RT
- Kolom 9 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
- Kolom 10 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah, jika dalam satu rumah terdapat 2 (dua) KK, cukup diisi 1 (satu) nama kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga
- Kolom 12 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 25 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 26 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.2 PERHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA**

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data wilayah administrasi penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan tim satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan tim satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi rapat	Orang*kali
		Penggandaan materi pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan form	Eks
		Pengolahan data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
F.	Penyusunan rencana aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga ahli sipil/arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan materi	Eks
	3. Penyusunan DED pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan rumah	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan baru/relokasi korban bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan lahan	Pembebasan lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Rembug warga	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi rapat	Orang*kali
		4. Tenaga ahli	
		5. Tenaga ahli perencanaan	Orang*bulan
		6. Tenaga ahli arsitektur	Orang*bulan
		7. Tenaga ahli teknik sipil	Orang*bulan
		8. Tenaga ahli ME	Orang*bulan
		9. Tenaga ahli plumbing	Orang*bulan
	3. Pembangunan rumah khusus + PSU	Pembangunan fisik rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan laporan pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan laporan pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

FORM 4.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
 PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M ²)	LUAS TANAH (M ²)	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN		
										MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)																				
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha																				
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaanakses																				
Total *)																					

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama kabupaten/kota
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 9 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 10 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 13 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²
- Kolom 14 : Diisi luas tanah dalam satuan m²
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.6 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH**

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer:	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Statistik	Orang*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi		Rp (Sub Total)

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	5. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	6. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

FORM 4.C.1 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi											
2	Pembangunan kembali											
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana											
	Jumlah *)											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Kegiatan layanan diisi sesuai dengan form 4.B.1 pada kolom 21 s.d. 24
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.3 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

PROVINSI :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				Tahun N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Penyediaan rumah layak huni					
Jumlah *)						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

KABUPATEN/KOTA :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN		
				TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau Bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni					
Jumlah *)						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.D.1 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

PROVINSI :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KABUPATEN/ KOTA	TOTAL RUMAH RUSAK (unit)	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TARGET				REALISASI				
					RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)	(unit rumah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total *)																
Persentase layanan **)																
Capaian SPM Total ***)																

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
Kolom 4 : Diisi nama Kabupaten/Kota
Kolom 5 : Diisi total rumah rusak
Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
**) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

**FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN/KOTA :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	RELOKASI	SUBSIDI UANG SEWA	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total *)																	
Persentase layanan **)																	
Capaian SPM Total ***)																	

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi total rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
- Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
- Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 18 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.D.3 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH TAHUN-N
 PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI :

NO.	JENIS PROGRAM RELOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA	TARGET				REALISASI			
					TOTAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	BELUM TERLAYANI
					(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)	(UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)											
2	Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha											
3	Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses											
Total *)												
Persentase layanan **)												
Capaian SPM Total ***)												

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
 - Kolom 3 : Diisi nama Kabupaten/Kota
 - Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 - Kolom 6 : Diisi total rumah yang terkena program relokasi
 - Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
 - Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
 - Kolom 9 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
 - Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
 - Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
 - *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
 - **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
 - ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi RumahYang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN/KOTA:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi RumahYang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

**FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER
DILOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota
**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data *existing*

- KETERANGAN:**
Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi nama warga
Kolom 3 : Diisi NIK
Kolom 4 : Diisi nomor KK
Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga
Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga
Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA
YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara

FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk SOP baru.

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana

Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana

Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak

Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak layak

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
(SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP		JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS		
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
 - Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
 - Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
 - Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS
 - Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP
 - Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan

Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan

Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan

Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala

**FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
DALAM RADIUS 0-50 METER**

PROVINSIDANKABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan

Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara

Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera ringan

Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera sedang dan/atau berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

**FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA
DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan ringan
- Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan sedang
- Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan berat
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANANTRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Layanan Trantibum	Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)			
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
 - Kolom 3 : Diisi dengan Kebutuhan sesuai mutu layanan
 - Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
 - Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format pengitungan kebutuhan masing-masing.
 - Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
- Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan

FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHA N	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
- Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembentukan dan/atau manajemen PPNS
- Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
- Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana
 - Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana
 - Kolom 4 : Diisi dengan jumlahkebutuhan sarana dan prasarana
 - Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana
 - Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana
 - Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

**FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK**

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGobatan	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cedera ringan
- Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera sedang dan/atau berat
- Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cedera
- Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan ringan
- Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat
- Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
- Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
- Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

**FORM 5.C.1 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN**

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran

Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran

Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.3 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.5 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA

PROVINSI :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar

Kolom 3 : Diisi dengan Program yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan

Kolom 7 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 8 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020

Kolom 9 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran Kolom 8 diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran Kolom 9 diisi dengan Sumber Dana

Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS
SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA

PROVINSI :

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Trantibum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar

Kolom 5 : Diisi Capaian (%) adalah jumlah angka pada kolom 4 dibagi dengan jumlah angka pada kolom 3 dikalikan 100

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapat layanan

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah Warga Negara Terkena Dampak Penegakan Perda/Perkada yang terlayani

Kolom 8 : Diisi Capaian (%) adalah 100% - (jumlah angka Kolom 7 dibagi dengan jumlah angka Kolom 6 dikalikan 100)

Kolom 9 : Diisi Capaian jumlah penegakan Perda/Perkada sesuai mutu pada kolom 5 ditambah dengan capaian pelayanan ganti rugi pada kolom 8 dibagi 2 (dua) dikalikan 100

Kolom 10 : Kategori : Sangat Tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

2) TRANTIBUMLINMAS SUB URURASANNBENCANA

FORM 5.2.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/ tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana

Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga

Kolom 4 : Diisi dengan Nik

Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga

Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin

Kolom 7 : Diisi dengan tempat lahir

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal lahir

Kolom 9 : Diisi dengan alamat tempat tinggal

Kolom 10 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara

Kolom 13 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus

Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya

Kolom 15 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan

FORM 5.2.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGARA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA								JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL										NOMOR VARIASI KELOMPOK KERAWANAN	PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA		
NO ·	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	EPIDEM I DAN WABAH		WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 4 : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 7 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 9-18 : Diisi dengan checklist sesuai kerawanan tempat tinggal Warga Negara
 - Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok variasi kerawanan bencana
 - Kolom 20 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok Warga Negara biasa penerima layanan penanggulangan bencana
 - Kolom 21 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok aparaturnya yang menangani sub urusan bencana
 - Kolom 22 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk ke dalam kelompok petugas operasi tanggap darurat bencana

FORM 5.2.A.3 REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN

DESAPROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	REKAPITULASI KELOMPOK WARGA NEGARA BERDASARKAN KELOMPOK KERAWANAN									TOTAL	
			VARIASI 1			VARIASI 2			VARIASI n				
			KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KELOMPOK JENIS	KK	JIWA	KK	JIWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 5+8+11	14 = 6+9+12

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kelurahan/Desa

Kolom 3 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 1

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 1 kerawanan bencana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 1 kerawanan bencana

Kolom 6 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi 2

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi 2 kerawanan bencana

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi 2 kerawanan bencana

Kolom 9 : Diisi dengan kelompok jenis bencana variasi n

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah kepala keluarga untuk variasi n kerawanan bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah orang untuk variasi n kerawanan bencana

Kolom 13 : Diisi dengan total KK pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n

Kolom 14 : Diisi dengan total Warga Negara pada variasi 1, variasi 2, dan variasi n

FORM 5.2.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA:
TAHUN ANGGARAN:

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)					JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN					KETERANGAN
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA		KERENTANAN			
								JIWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan

Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah Warga Negara di desa kawasan rawan bencana

Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Warga Negara (KK) di desa kawasan rawan bencana

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berkebutuhan khusus di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana

Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

FORM 5.2.A.5 DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCANA BERDASARKAN LOKASI PENUGASAN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

DATA DASAR PETUGAS														STATUS PETUGAS						SERTIFI- KASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN			LOKASI PENUGASAN		KET.
NO .	NAMA LENGKA P	NI K	NOMO R KK	JENIS KELAMI N (L/P)	TEMPA T LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMA T	DESA/ KELURAH AN	KEC .	KONDISI EKONOM I (MISKIN/ TIDAK MISKIN)	BERKEBUTUH AN KHUSUS (YA/TIDAK)	JENIS KEBUTUH AN KHUSUS (Jika YA)	KELOMP OK UMUR RENTAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	POSKO	POS LAPANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

KETERANGAN:

- Kolom 1 :Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 :Diisi dengan nama
- Kolom 3 :Diisi dengan NIK
- Kolom 4 :Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
- Kolom 5 :Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 6 :Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 7 :Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 8 :Diisi dengan alamat
- Kolom 9 :Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal
- Kolom 10 :Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
- Kolom 11 :Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi
- Kolom 12 :Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
- Kolom 13 :Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika Kolom 14 dijawab ya
- Kolom 14 :Diisi checklist jika petugas operasi termasuk dalam kelompok umur rentan (berkebutuhan khusus atau lanjut usia)
- Kolom 15-20 :Diisi dengan checklist sesuai status petugas
- Kolom 21 :Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
- Kolom 22-26 :Diisi dengan checklist sesuai penugasan dan lokasi
- Kolom 27 :Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll

FORM 5.2A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)					TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	DESA	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 + 10

- KETERANGAN:
- Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait
- Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)

FORM 5.2.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT					LOKASI		KONDISI	
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan
Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checklist
Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan
Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan
Kolom 11-12 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi peralatan

FORM 5.2.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang
Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang
Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang
Kolom 6 – 7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang

FORM 5.2.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :
 KEJADIAN BENCANA :
 LOKASI :
 TANGGAL KEJADIAN :

NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin/tidak miskin)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (jika ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara

Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara

Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara

Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jenis kelamin

Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir Warga Negara

Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir Warga Negara

Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara

Kolom 9 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara

Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara

Kolom 12 : Diisi checkklist jika ya dan strip jika tidak

Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya

Kolom 14 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/ibu menyusui, penyandang cacat/berkebutuhan khusus, orang lanjut usia)

Kolom 15-25 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.2.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA

(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR WARGA NEGARA							STATUS					PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA					
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KORBAN			PENGUNGSI		WARGA NEGARA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENANGANI SUB URUSAN BENCANA	PETUGAS			
							MENINGGAL	HILANG	BUTUH BANTUAN MEDIS DARURAT	BUTUH BANTUAN MEDIS LANJUT	SELAMAT			PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI
1	2	3	4	5A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin sesuai form 5.A.1
Kolom 6 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A.1
Kolom 8 - 18 : Disi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.2.A.11 DAFTAR PETUGAS AKTIF PADA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :
 KEJADIAN BENCANA :
 LOKAS :
 TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR PETUGAS										STATUS PETUGAS						SERTIFIKASI YANG DIMILIKI	PENUGASAN				LOKASI PENUGASAN		
NO.	NAMA PETUGAS	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (DD/MM/YYYY)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	PNS	TNI	POLRI	SAT LINMAS	TENAGA KONTRAK	NON APARATUR		PETUGAS TRC KLB	PETUGAS TRC PDB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI TANGGAP DARURAT	POSKO	POS LAPANGAN	
																						KEC.	DESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama petugas operasi
 Kolom 3 : Diisi dengan nik petugas operasi
 Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga petugas operasi
 Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin petugas operasi
 Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir petugas operasi
 Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir petugas operasi
 Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal petugas operasi
 Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal petugas operasi
 Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal petugas operasi
 Kolom 11-16 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi
 Kolom 17 : Diisi dengan sertifikasi keahlian yang dimiliki oleh petugas operasi
 Kolom 18-24 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.2.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN	
							DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN >24 JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana
Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana
Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPBD
Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana
Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)	HARGA SATUAN (x Rp.1000)	KEBUTUHAN BIAYA (x Rp.1000)
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 12- 13	15	16 = 14 x 15

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan

Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah kebutuhan untuk satuan keluaran

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah ketersediaan

Kolom 14 : Diisi sesuai dengan selisih antara (kebutuhan-ketersediaan) kolom 12 dikurangi kolom 13

Kolom 15 : Diisi sesuai dengan harga satuan sesuai keluaran

Kolom 16 : Diisi dengan kebutuhan biaya pemenuhan kolom 14 dikali kolom 15

FORM 5.2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n							TOTAL KEBUTUHAN	
							TARGET KEBUTUHAN		KETERSEDIAAN/ SUDAH TERPENUHI	USULAN PEMENUHAN		HARGA SATUAN (xRp.1000)	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	FISIK	ANGGARAN
							Volume	Kuantitas		Volume	Volume	Kuantitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8 - 10	12 = 9	13	14=11X12X13	15= Σ (USULAN PEMENUHAN)	16= Σ (JUMLAH BIAYA)

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
 Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom 10)
 Kolom 12 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan kolom 9)
 Kolom 13 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n
 Kolom 14 : Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13)
 Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)
 Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuhan keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)

FORM 5.2.C.1 RENCANA PEMENUHAN DAN KERANGKA PENDANAAN UNTUK PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							WARGA NEGARA	KK	APARAT/ PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24 X25	27	28	29=27X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah kk penerima layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah aparat/petugas penerima layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana
- Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
- Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
- Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
- Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
- Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
- Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
- Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

FORM 5.2.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	PENERIMA LAYANAN DASAR				JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (TAHUN SEBELUMNYA)	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA															KONDISI AKHIR 5 TAHUN	
							WARGA NEGERA	KK	APARAT / PETUGAS	DESA				TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (xRp.1000)
														Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (xRp.1000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=15X16	18	19	20=18X19	21	22	23=21X22	24	25	26=24X25	27	28	29=27X28	30 = 15 + 18 + 21 + 24 + 27	31 = 17 + 20 + 23 + 26 + 29

KOEFSISIEN PROYEKSI	ORANG	BARANG	HARGA
	1	2	3

KETERANGAN
Kolom 1, diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun perencanaan
Kolom 2, dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahun perencanaan
Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya

Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya

Kolom 10 : Diisi sesuai dengan sumber dana

Kolom 11 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1 (kolom 9 dikali koefisien proyeksi)

Kolom 12 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1

Kolom 13 : Diisi dengan kolom 11 dikalikan kolom 12

Kolom 14 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2 (kolom 11 dikali koefisien proyeksi)

Kolom 15 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 12 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 16 : Diisi dengan kolom 14 dikalikan kolom 15

Kolom 17 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 14 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 18 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3 (kolom 15 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 19 : Diisi dengan kolom 17 dikalikan kolom 18

Kolom 20 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 17 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 21 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4 (kolom 18 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 22 : Diisi dengan kolom 20 dikalikan kolom 21

Kolom 23 : Diisi dengan proyeksi target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 20 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 24 : Diisi dengan proyeksi harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5 (kolom 21 dikali dengan koefisien proyeksi)

Kolom 25 : Diisi dengan kolom 23 dikalikan kolom 24

Kolom 26 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 11, kolom 14, kolom 17, kolom 20, dan kolom 23

Kolom 27 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 13, kolom 16, kolom 19, kolom 22, dan kolom 25

FORM 5.2.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		CAPAIAN MUTU LAYANAN (%)	BOBOT KEPENTINGAN (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	BIAYA (xRp.1000)	FISIK	KEUANGAN			PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15	16 = $\bar{X}(12+13+14)$	17 = $\Sigma(15x16)$	18 = $\bar{X}(12+14)$	19 = $\Sigma(15x18)$	20	21	22

KETERANGAN:
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai formular 5.C.1
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)
Kolom 18 : Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)
Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana
Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.2.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n										CAPAIAN RATA-RATA (%)			BOBOT KEPENTINGAN	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI			
							TARGET				REALISASI				KOEFSISIEN INDIKATOR LAYANAN (1 / 0)	CAPAIAN %			FISIK		KEUANGAN	MUTU LAYANAN	PROGRES KINERJA KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES KINERJA SUB KEGIATAN BERJALAN (%)				PROGRES CAPAIAN KELUARAN (%)	TOTAL PROGRES CAPAIAN SUB KEGIATAN BERJALAN (%)	
							VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)	VOLUME	KUANTITAS	HARGA	JUMLAH BIAYA (xRp.1000)		FISIK	KEUANGAN	MUTU LAYANAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8X9X10	12	13	14	15=12X13X14	16	17=((12X13) / (8X9)) X16X100%	18=(15/11)X100%	19	20=X̄ (Capaian Fisik)	21=X̄ (Capaian Keuangan)	22=X̄ (Capaian Mutu Layanan)	23	24=X̄(20+21+22)	25=Σ(23X24)	26=X̄(20+21)	27=Σ(23X26)	28	29	30	

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar

Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota

Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1

Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1

Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1

Kolom 11 : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10)

Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantiti tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 14 : Diisi sesuai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n

Kolom 15 : Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13 dikali kolom 14)

Kolom 16 : Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan ketercapaian indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar.
(diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan tercapai lebih dari 24 jam)

Kolom 17 : Diisi dengan persentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantiti realisasi dibagi dengan volume dikali kuantiti target)

Kolom 18 : Diisi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target)

Kolom 19 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan

Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

Kolom 21 : Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

Kolom 22 : Diisi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan

Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen

Kolom 24 : Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)

Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)

Kolom 26 : Diisi dengan progres capaian spm tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)

Kolom 27 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)

Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana

Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan

Kolom 30 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.2.E.1 PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN	KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
1	2	3		4	5	6	7=4X5X6	8= i l(Σ7)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana		0,4	0,17		
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana		0,6			
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana		0,1	0,50		
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)		0,1			
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi		0,2			
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2			
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		0,2			
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana		0,2			
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis Prioritas		0,3	0,33		
		10	Respon cepat darurat bencana		0,3			
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana		0,1			
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana		0,3			
JUMLAH					3	1		

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan

Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan

Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan layanan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1

Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1

Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 5 dan kolom 6.

Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100

FORM 5.2.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES KINERJA BERJALAN (%)	KINERJA PER LAYANAN TAHUN X (%)	KINERJA SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	KINERJA SPM TAHUN X (%)
1	2	3		4	5	6=X(5)	7=4X5	8=Σ7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana					
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana					
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi					
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas					
		10	Respon cepat darurat bencana					
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana					
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 5.2.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

PROVINSI :
 KABUPATEN/KOTA :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES CAPAIAN BERJALAN (%)	CAPAIAN PER LAYANAN TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM TAHUN X (%)
1	2	3		4	5	6=X(5)	7=4X5	8=Σ7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian risiko bencana					
		2	Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3	Penyusunan rencana penanggulangan bencana					
		4	Pembuatan rencana kontinjensi (renkon)					
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi					
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana					
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas					
		10	Respon cepat darurat bencana					
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana					
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana					

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
 Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
 Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
 Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
 Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capaian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
 Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
 Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KOTA/KEC/DESA :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRI LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SESEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MASIH MEMILIKI KELUARGA, TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN PENELANTARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyangand Disabilitas																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Anak																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Lanjut usia																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																
Gelandangan Pengemis																
1																
2																
Dst																
JUMLAH TOTAL																

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir
- Kolom 6 : Diisi dengan alamat
- Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tiggal di keluarga (rumah) atau tidak
- Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal ketika di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll
- Kolom 10 : Diisi dengan penerima pelayanan dengan kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi dengan status perkawinan
- Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas
- Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus
- Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungan
- Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan

**FORM 6.A.2 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR,
ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI DALAM PANTI DAN/ATAU LEMBAGA BAIK MILIK PEMERINTAH MAUPUN MASYARAKAT**

PROVINSI :

NO	KABUPATEN /KOTA	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTA	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total										

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Kab/Kota
3. Hasil Asesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima Pelayanan di Dalam Panti Sosial dan/Atau Lembaga di Bidang Kesos baik milik Pemerintah maupu Masyarakat

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik)
Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas intelektual)
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik)
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda)
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah anak terlantar
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis
Kolom 11 : Diisi dengan keterangan tambahan

**FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR,
ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS)**

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri valasi dan/atau pendataan dan veri valasi Dinsos Kab/Kota
3. Hasil Asesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima Pelayanan di Dalam Panti Sosial dan/Atau Lembaga di Bidang Kesosial baik milik Pemerintah maupun Masyarakat

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
Kolom 3 : Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4 : Diisi dengan nama desa/kelurahan
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas intelektual) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 8 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas ganda) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 10 : Diisi dengan jumlah anak terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 11 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 12 : Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
Kolom 13 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.4 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total															

Sumber Data:

- 1. Daerah rawan bencana
- 2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi
- Kolom 15 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi
- Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

PROVINSI :

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR	TANAH LONGSOR	LETUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTRIM	ANGIN TOPAN	KEKERINGAN	KONFLIK SOSIAL	AKSI TEROR	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Total															

Sumber Data:

1. Daerah rawan bencana
2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrim
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kekeringan
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial
 Kolom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror
 Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran
 Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi
 Kolom 15 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi
 Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
 Kolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PEKSOS/PENSOS/TKS/RELAHAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT BEKERJA	STATUS SDM		REKRUITMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan Pengemis di dalam panti/lembaga									
1			- UPTD (Panti Sosial Penyandang Disabilitas - Panti Sosial Masyarakat - LKS - Rumah singgah - Puskesmas - SLRT						
2									
Dst									
	Total								
Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana									
1			- Dapur umum - LDP - Manajemen logistic - Manajemen Shelter - TRC - Keposkoan - KSB						
2									
Dst									
	Total								

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Prov/Kab/Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM kesos
Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial
Kolom 4 : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/beraktifitas
Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat
Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos
Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.7 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI

PROVINSI :

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTHKAN SARANA PRASARANA	NAMA SARANA DAN PRASARANA	STATUS KEPEMILIKAN		AKREDITASI	KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			KET
			PEMERINTAH	MASYARAKAT		SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di dalam panti/ lembaga Disabilitas dst	Nama panti sosial penyandang disabilitas										
2)												
dst												
		Total panti penyandang disabilitas yang ada										
		Jumlah panti penyandang disabilitas yang Dibutuhkan										
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di dalam panti/lembaga anak dst	Nama panti sosial anak										
2)												
dst												
		Total panti anak yang ada										
		Jumlah panti anak yang dibutuhkan										
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total lansia yang memerlukan layanan di dalam panti/lembaga lansia dst	Nama panti sosial lanjut usia										
2)												
dst												
		Total panti lansia yang ada										
		Jumlah panti lansia yang dibutuhkan										
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti sosial											
1)	Jumlah total gepeng yang memerlukan layanan di dalam panti/lembaga gepeng dst	Nama panti sosial gepeng										
2)												
dst												
		Total panti gepeng yang ada										
		Jumlah panti gepeng yang dibutuhkan										
5	Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi											
1)	Jumlah estimasi korban bencana provinsi dst	-Dapur umum										
2)		-LDP										
dst		-Manajemen logistic										
		-manajemen Shelter										
		-TRC										
		-Keposkoan										
		-KSB										
		Total sarpras yang ada										
		Jumlah sarpras yang dibutuhkan										

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri vali dan/atau pendataan dan veri vali Dinsos Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan jenis jumlah total (populasi)
Kolom 3 : Diisi dengan nama sarana prasarana
Kolom 4 : Diisi dengan status kepemilikan, jika milik pemerintah
Kolom 5 : Diisi dengan status kepemilikan, jika milik masyarakat
Kolom 6 : Diisi dengan status akreditasi jika sarpras merupakan kelembagaan yang harus terakreditasi
Kolom 7 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana sangat baik (tidak memerlukan renovasi)
Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana baik (belum memerlukan renovasi)
Kolom 9 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurnag baik (memerlukan renovasi)
Kolom 10 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan rendah
Kolom 11 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan sedang
Kolom 12 : Diisi dengan kondisi sarana prasarana kurang baik dengan tingkat kerusakan berat

FORM 6.B.1 PENGHITUNGAN PENYANDANG DISABILITAS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Penyandang Disabilitas Terlantar di Wilayah Provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Disabilitas	a. Penyediaan Permakanan		(a) jumlah penyandang Disabilitas Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) indeks permakanan perorang per hari; (d) pengadaan sarana prasarana dapur; dan (e) bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = $a \times b \times c$
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b.Penyediaan Sandang		(a) pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu) stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk: anak perempuan, balita, dan yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; dan (f) transportasi petugas.	RUMUS = $a+b+c+d+e+f$
		1.Standar SDM	c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti Penyandang Disabilitas. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti Penyandang Disabilitas dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = $a+b$
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Penyandang Disabilitas dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		2.Standar sarana dan prasarana	d.Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu, (d) alat bantu dengar, (e) kruk, (f) tripod, (g) tongkat putih, (h) reglet (alat tulis untuk tuna netra), dan (i) transport petugas.	Sesuai kebutuhan
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) obat psikiatri; (b) obat umum; (c) tensimeter; (d) timbangan; (e) pengukur tinggi badan; (f) pengukur gula darah; (g) termometer; (h) honor perawat; (i) biaya kunjungan dokter; (j) biaya kunjungan psikiater; dan (k) biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h.Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) biaya transportasi pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) biaya transportasi pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial; dan (b) biaya transportasi penyandang disabilitas.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport penyandang disabilitas terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.2 PENGHITUNGAN ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Anak Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Anak Terlantr di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Anak	a. Pengasuhan		(d) Jumlah tenaga kesejahteraan sosial; (e) Jangka waktu pemberian layanan; (f) Indeks honor	RUMUS = $a \times b \times c$
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial	b. Penyediaan permakanaan		(a) Jumlah anak terlantar penerima permakanaan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = $a \times b \times c$
		1. Standar SDM			(c) Indeks permakanaan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanaan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
		2. Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
			c. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama anak per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$
			d. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk pantimilik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Anak Terlantar. RUMUS = b Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dan mampu menyediakan anggaran. RUMUS = $a + b$

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Anak Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Biaya transport anak; (c) Perlengkapan sekolah terdiri atas buku, tas sekolah, dan alat tulis.	RUMUS = a + b + c
			j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) biaya transport anak terlantar; dan (c) biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti		(a) Biaya perjalanan atau transport Pekerja Sosial Profesional; (b) Biaya transport anak terlantar.	Sesuai dengan standar biaya

FORM 6.B.3 PENGHITUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Lanjut Usia Terlantar di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Lanjut Usia Terlantrar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Lanjut Usia	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah Lanjut Usia Terlantar penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah Provinsi.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = $a \times b \times c$
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
		1. Standar SDM				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		2. Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian olahraga 1 (satu)stel, dan pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) pembelian kebutuhan khusus untuk lanjut usia yang mengalami bedridden setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agama per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$
			c. Penyediaan asrama yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlnatar. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar. RUMUS = $a + b$
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Lanjut Usia Terlantar dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			d. Penyediaan alat bantu		(a) Kursi roda, (b) kaca mata, (c) pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu dengar, (d) kruk, (f) Lansia walker; (g) tripod, (h) tongkat; (i) transport petugas.	Sesuai dengan kebutuhan
			e. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial		(a) Obat umum; (b) Obat khusus; (c) Tensimeter; (d) Timbangan; (e) Pengukur gula darah, kolesterol, dan asam urat; (f) Termometer; (g) Honor perawat; (h) Biaya kunjungan dokter; (i) Biaya kunjungan psikiater; (j) Biaya kunjungan pekerja sosial medis.	Sesuai dengan kebutuhan
			f. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) pembelian alat peraga; (c) pembelian alat tulis kantor; Pembelian bahan/ alat pengisi waktu luang.	RUMUS = a + b + c + d
			g. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport lanjut usia.	RUMUS = a + b
			j. Pemberian pelayanan k. penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport lanjut usia terlantar; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			m. Pemulasaraan		(a) Paket biaya pemulasaraan; (b) Transport petugas.	RUMUS = a + b

FORM 6.B.4 PENGHITUNGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Gelandangan dan Pengemis di wilayah provinsi	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa :	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam panti		RUMUS: X = Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti. Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar Biaya Pribadi Gelandangan dan Pengemis	a. Penyediaan Permakanan		(a) Jumlah gelandangan dan pengemis penerima permakanan di dalam panti per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun;	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $a \times b \times c$
		B. Standar Sarana dan Prasarana Panti Sosial			(c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Pengadaan sarana dan prasarana dapur; (e) Bantuan permakanan dengan standar biaya sama dengan panti sosial milik Pemerintah Daerah provinsi.	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $(a \times b \times c) + d$
		1.Standar SDM				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = e
		2.Standar sarana dan prasarana	b. Penyediaan Sandang		(a) Pembelian pakaian terdiri atas pakaian seragam sekolah, pakaian harian 4 (empat) stel, pakaian dalam 6 (enam) buah per tahun; (b) Pembelian perlengkapan mandi setiap bulan; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk anak perempuan dan balita setiap bulan; (d) Pembelian alas kaki terdiri atas sandal dan sepatu per tahun; (e) Perlengkapan ibadah sesuai dengan agamanya per tahun; (f) Transport petugas.	RUMUS = $a + b + c + d + e + f$
			c. Penyediaan asrama/ wisma yang mudah diakses		(a) biaya pembangunan gedung baru; (b) biaya pemeliharaan gedung dan sarana prasarana; (c) dukungan sarana dan prasarana untuk panti milik masyarakat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = b
						Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis. RUMUS = $a + b$
						Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki panti sosial Gelandangan dan Pengemis dapat merujuk ke panti sosial milik masyarakat di wilayahnya. RUMUS = c
			d. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti		(a) Obat umum; (b) Tensimeter; (c) Timbangan; (d) Pengukur tinggi badan; (e) Termometer; (f) Honor perawat; (g) Biaya kunjungan dokter.	Sesuai dengan kebutuhan

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
			e. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat bermain anak; (c) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b + c
			f. f. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari		(a) Honor pekerja sosial profesional; (b) Pembelian alat tulis kantor.	RUMUS = a + b
			g. Pemberian bimbingan keterampilan dasar		(a) Honor instruktur; (b) Bahan keterampilan; (c) Alat keterampilan.	RUMUS = a + b + c
			h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis.	RUMUS = a + b
			i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial; (b) Biaya transport gelandangan dan pengemis serta keluarganya;	RUMUS = a + b + c
			j. Pemulangan ke k. daerah asal		(a) Biaya transport pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial;	RUMUS = a + b

FORM 6.B.5 PENGHITUNGAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI WILAYAH PROVINSI

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/ PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah provinsi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah provinsi		RUMUS: $X = \frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi.}}$ Indikator Kinerja = $X/Y \times 100\%$
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanan		(a) Paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari.	RUMUS = $a + b + c$ * $a = d \times e \times f$
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapankeluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari.	RUMUS = $a + b + c$ * $a = d \times e$
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = $a + b + c$ * $a = d \times e$
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = $a + b + c$ * $a = d \times e$
			e. Pelayanan dukungan psikososial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.	RUMUS = $a + b + c$ * $a = d \times e$

FORM 6.C.1 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR "TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jneis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan Alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.2 RENCANA PEMENUHAN PENYANDANG ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR "TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.3 RENCANA PEMENUHAN LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : ; Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : ; Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.4 RENCANA PEMENUHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS LANSIA DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			T HUN N + 2			T HUN N + 3			T HUN N + 4			T HUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenus satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian Kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.C.5 RENCANA PEMENUHAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL DIWILAYAH PROVINSI

PROVINSI :

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA													KONDISI AKHIR "TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET		HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 5 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020
- Kolom 7 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 8 : Diisi dengan alokasi anggaran tahun 2019 per jenis keluaran
- Kolom 9 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 10 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2020
- Kolom 11 : Diisi dengan harga satuan tahun 2020
- Kolom 12 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 10 dan 11
- Kolom 13 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2021
- Kolom 14 : Diisi dengan harga satuan tahun 2021
- Kolom 15 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 13 dan 14
- Kolom 16 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2022
- Kolom 17 : Diisi dengan harga satuan tahun 2022
- Kolom 18 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 16 dan 17
- Kolom 19 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2023
- Kolom 20 : Diisi dengan harga satuan tahun 2023
- Kolom 21 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 19 dan 20
- Kolom 22 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan pelayanan dasar tahun 2024
- Kolom 23 : Diisi dengan harga satuan tahun 2024
- Kolom 24 : Diisi dengan target biaya pemenuhan dari perkalian kolom 22 dan 23
- Kolom 25 : Diisi dengan kondisi akhir tahun 2024

FORM 6.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.1
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI ANAK TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.2
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.3 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BAGI LANSIA TERLANTAR DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.3
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENGEMIS DAN GELANDANGAN LANSIA DALAM PANTI

PROVINSI :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) berdasarkan form 6.C.4
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 ; Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPENG DILUAR PANTI

KABUPATEN KOTA :

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
							%				
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (*output*) form 6.C.5
- Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 7 ; Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (*output*)
- Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6.E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			APAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASA			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyandang Disabilitas Terlantar								
2	Anak Terlantar								
3	Lansia Terlantar								
4	Gepeng								
5	Bencana alam dan Sosial								

- Keterangan :
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sosial sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah klien luar panti
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah populasi yang membutuhkan rehabsos luar panti dari penerapan SPM
- Kolom 5 : Capaian (%) = jumlah klaim dalam panti yg terpenuhi kebutuhan dasar selama 1 tahun anggaran dibagi populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng di propvinsi yang membutuhkan rehabso di dalam panti dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal sosial yg berbasi penerima dan standar teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
- Kolom 8 : Capaian (%) = realiasi dibagi dengan targer dikalikan 100%
- Kolom 9 : Capaian penerima layanan + dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua)
- Kolom 10 : Kategori : sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

C. PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)$$

Keterangan:

- IP_{SPM}

= Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018.
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan Dasar

= Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar

= Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran Permendagri ini.
- BM

= Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP

= Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 – 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
3	80 – 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 – 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 – 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar =

Persentase Pencapaian Mutu Barang

+

Persentase Pencapaian Mutu Jasa

+

Persentase Pencapaian Mutu SDM

N

Keterangan:

- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

= Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
- Persentase pencapaian mutu barang

= Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang
- Persentase pencapaian mutu jasa

= Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa
- Persentase pencapaian mutu SDM

= Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM
- N

= Jumlah variabel pembagi

Catatan:

- 1)

Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu.
- 2)

Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Indikator Jenis dan Mutu Minimal Pelayanan dasar

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan:

- 1)

Nomor adalah nomor urut;

- 2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018;
- 3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/atau jasa dan/atau SDM; serta
- 4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen.

Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut:

Pencapaian mutu barang =

$$IP_{\text{Mutu barang}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu jasa}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

$$IP_{\text{Mutu SDM}} = \frac{\text{butir1} + \text{butir2} + \dots + \text{butir dst}}{N}$$

Keterangan:

Indeks pencapaian (IP) = Indeks pencapaian mutu barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L

butir barang = Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L

butir jasa = Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L

butir SDM = Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L

N = Jumlah variabel

5. Penghitungan persentase penerima layanan dasar:

$$\text{Persentase IP penerima layanan dasar} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terpenuhi kebutuhan}}{\text{Jumlah Warga Negara yang menjadi sasaran SPM}}$$

Keterangan :

Indeks Pencapaian (IP) = Indeks pencapaian penerima layanan sesuai dengan Permen K/L

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian Kebutuhan penerapan SPM daerah

Jumlah Warga Negara = Jumlah warga negara yang menjadi target yang menjadi sasaran penerima layanan SPM yang termuat dalam SPM dokumen perencanaan daerah

D. LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

I. FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM OLEH PERANGKAT DAERAH PROVINSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa perangkat daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Perangkat Daerah Provinsi.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD dan penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD dalam kurun waktu tertentu.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II PENERAPAN SPM BIDANG

- A. PENGUMPULAN DATA;
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR;
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR;
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR.

Empat tahapan penerapan SPM di atas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana lampiran untuk masing-masing bidang urusan SPM.

BAB III PENCAPAIAN SPM BIDANG

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara

secara minimal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah.

2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh Perangkat Daerah adalah target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya.

Tabel: Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Tahun.....

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1				Setiap tahun			Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang
2								

3 Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. (Pedomani Format laporan capain SPM pada Lampiran VII Peraturan Gubernur ini).

6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

Tabel: Permasalahan Penerapan SPM Bidang Tahun

NO	PERMASALAHAN	AKSI/SOLUSI
1	2	3
1 .	PENGUMPULAN DATA	
	1	
	2	
	3 Dst	
2 .	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	1	
	2	
	3 Dst	
3 .	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	1	
	2	
	3 Dst	
4 .	PELAKSANAAN	
	1	
	2	
	3 Dst	
5 .	LAIN – LAIN	

7. Rekapitulasi Capaian SPM Kabupaten/Kota

Tabel:Rekapitulasi Capaian SPM Bidang..... Kabupaten/Kota Tahun

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEG ORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN SPM BIDANG.....

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM beserta besaran alokasi anggarannya selama 1 (satu) tahun anggaran untuk masing-masing Sub Kegiatan.

Tabel: Kegiatan dan Anggaran SPM BidangTahun

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		TOTAL SERAPAN
1	2		3	4	5
			PAGU	REALISASI	SERAPAN
	SPM BIDANG		Rp	Rp	 %
1 .			Rp	Rp	 %
2 .	1		Rp	Rp	 %
	2		Rp	Rp	 %
	3	Dst	Rp	Rp	 %
			Rp	Rp	 %
3 .	1		Rp	Rp	 %
	2		Rp	Rp	 %
	3	Dst	Rp	Rp	 %
	Dst		Rp	Rp	 %

BAB V PENUTUP

II. FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan

pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

- A. Pengumpulan data;
- B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
- D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam FormatTahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran VII-B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka

penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah,yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapandan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH